

ANALISIS REALISASI ANGGARAN UNTUK MENILAI EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Alful Laila Rosyidah Noor Shofwah

Alfullaila2@gmail.com

Nur Handayani

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

In this modern era, the community requires clean or good government that can provide accountable and transparent information in their financial management. The budget which is managed by public must apply the principles of efficiency and effectiveness which become the indicators of financial performance of public entity. This research aimed is to analyze the efficiency and effectiveness of the Surabaya City Social Service budget in the 2016-2018 period. Whei, the data collection technique use descriptive qualitative method by collecting data, calculating the effetiveness and its efficiency, and analyzing the information. As the result, the objective conclusions could be drawn on its problem. Moreover, the research period was 3 years, namely 2016-2018 fiscal year. The research result of its effectiveness in 2016-2018 was effective in overall. It happened as the result of achieving the effectiveness level was more than 90%. In other words, it was assumed good. Besides, it met the criteria which had been set. On the other hand, the research result, of its effeciency in 2016-2018 was entirely less efficient. It happened as the use of direct expenditure budget was greater than the use of the realization of the total budget.

Keywords: social service budget, effectiveness, efficiency.

ABSTRAK

Masyarakat pada era modern menuntut pemerintah yang bersih atau *good government* yang dapat menyediakan informasi yang akuntabel dan transparan dalam pengelolaan keuangannya. Anggaran yang dikelola oleh organisasi sektor publik harus menerapkan prinsip efisiensi dan efektivitas yang menjadi indikator kinerja keuangan suatu entitas sektor publik. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis efisiensi dan efektivitas anggaran belanja Dinas Sosial Kota Surabaya pada periode 2016-2018. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan cara mengumpulkan data, menghitung efektivitas dan efisiensi, dan menganalisis perhitungan sehingga bias ditarik kesimpulan yang obyektif terhadap masalah. Periode penelitian ini selama 3 tahun yaitu tahun anggaran 2016-2018. Hasil penelitian untuk tingkat efektivitas pada tahun 2016-2018 seluruhnya dalam kategori efektif karena hasil pencapaian tingkat efektivitas lebih dari 90%, hal ini dapat dikatakan baik dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Hasil penelitian untuk tingkat efisiensi pada tahun 2016-2018 seluruhnya dalam kategori kurang efisien, hal ini terjadi karena penggunaan anggaran belanja langsung lebih besar dari penggunaan realisasi total anggaran belanja. Kata kunci: anggaran dinas sosial, efektivitas, efisiensi.

PENDAHULUAN

Saat ini dengan waktu yang relatif singkat akuntansi sektor publik telah mengalami perkembangan yang pesat. Akuntansi sektor publik mendapat perhatian yang lebih besar terhadap praktik akuntansi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah, badan umum milik negara atau daerah, dan organisasi publik lainnya dibandingkan pada masa sebelumnya. Sektor publik memiliki tugas dan fungsi tersendiri yang dapat dijalankan oleh sektor swasta seperti menghasilkan beberapa jenis pelayanan publik yaitu layanan komunikasi, penarikan pajak, pendidikan, transportasi publik, dan lain sebagainya tetapi dalam tugas tertentu sektor swasta tidak dapat menggantikan posisi sektor publik seperti fungsi birokrasi pemerintah. Sektor publik dapat diartikan sebagai sektor pelayanan yang menyediakan barang dan jasa untuk masyarakat umum dengan sumber dana yang berasal dari pajak dan pendapatan pajak lainnya, dimana kegiatannya sudah diatur dari peraturan

yang berlaku (Rai, 2009). Hal ini menumbuhkan rasa keinginan masyarakat adanya pemerintahan yang bersih (*good governance*) dan adanya akuntabilitas publik di instansi pemerintahan.

Pengertian *good governance* dapat diartikan sebagai cara pengelolaan urusan publik dan atau pemerintahan yang baik. Setelah era reformasi dan pengelolaan urusan publik yang lebih luas, mengakibatkan semakin kuat tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan pemerintah yang baik menuju pada terwujudnya *good governance*, sebab *good governance* telah menjadi suatu paradigma baru yang sangat didambakan masyarakat. Mewujudkan *good governance* diperlukan perubahan kegiatan pemerintah yang mendasar dari sistem lama yang serba sentralistik, dimana pemerintah pusat menciptakan aturan yang harus ditaati oleh pemerintah daerah dalam menciptakan kebijakan. Perlu adanya paradigma baru untuk mengurangi ketergantungan kebijakan pemerintah pusat, mengurangi ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dengan meminta bantuan kepada pemerintah pusat tanpa dijalani langsung oleh pemerintah daerah.

Pemerintah memberikan otonomi kepada pemerintah daerah agar supaya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan dapat mensejahterakan rakyat. Adapun aspek terpenting yang mendukung otonomi daerah adalah penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sesuai dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Kylchova (2014) Anggaran adalah suatu proses perencanaan kegiatan bisnis masa depan yang hasilnya didokumentasikan dengan sistem anggaran. Anggaran dapat dianggap sebagai instrumen perencanaan dan pengendalian operasi keuntungan dalam organisasi laba dimana tingkat budget bergantung pada kapasitas organisasi. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan pemerintah daerah mampu membiayai kegiatan pelaksanaan infrastruktur, untuk itu pemerintah daerah dituntut membangun kinerja yang baik. Ukuran kinerja tidak dapat diukur hanya satu ukuran kinerja saja, perlu adanya ukuran kinerja untuk tujuan yang berbeda. Kinerja diukur melalui penggunaan pengukuran kinerja dimana suatu matrik digunakan untuk mengkuantifikasi efisiensi atau efektivitas dari suatu kegiatan (Matthew, 2011).

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pemerintah daerah telah menerapkan partisipasi setiap satuan satuan kaerja dalam penyusunan anggaran SKPD yang memuat di Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang biasa disebut RKA SKPD. Dalam RKA SKPD, masing-masing SKPD telah memuat indikator - indikator kinerja yang akan dicapai untuk setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Sedangkan RKA memuat input, output dan outcome dari masing-masing program dan kegiatan. Jadi dalam RKA memuat sasaran anggaran.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat serta semakin dipertegas melalui Pasal 54 ayat (2) yang menyatakan bahwa pelaksanaan belanja daerah harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Efektivitas dan efisien diartikan sebagai pengukur keberrhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Jika sebuah tugas dapat selesai dengan pemilihan cara-cara yang sudah ditentukan, maka cara tersebut adalah benar atau efektif. Efisiensi merupakan kriteria efektivitas mengacu pada ukuran penggunaan sumber daya langka dari organisasi. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 4 ayat (4) menjelaskan bahwa efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. Sedangkan efisien pada ayat (5) merupakan pencapaian keluaran yang

maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

Pada Dinas Sosial Surabaya merupakan suatu wadah pelayanan masyarakat meliputi pengelolaan rehabilitasi dan perlindungan sosial, bantuan dan jaminan sosial, pengembangan sosial serta partisipasi sosial masyarakat dengan pemanfaatan nilai-nilai dan norma. Dinas sosial memiliki tujuan-tujuan tertentu dalaam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat meliputi penyediaan rumah layak huni, meningkatkan kualitas norma masyarakat dan toleransi antar umat beragama, meningkatkan tata kelola administrasi perangkat daerah yang baik, dan lain-lain. Oleh sebab itu dengan mengetahui laporan realiasi anggaran kegiatan, peneliti dapat mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi anggaran kegiatan apakah seluruh kegiatan di Dinas Sosial Surabaya sudah terlaksana dengan baik.

TINJAUAN TEORITIS

Akuntansi

Haryono (2011:4) menyatakan akuntansi sebagai sistem informasi yang mengaku aktivitas bisnis, mengolah data sebagai laporan, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan. Berbeda dengan pendapat Lubis (2010:2) menyatakan bahwa akuntansi sebagai seperangkat pengetahuan yang mempelajari rekayasa penyediaan berupa informasi keuangan kuantitatif dari suatu unit organisasi dan cara penyampaian (pelaporan) informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Anggaran Sektor Publik

Mardiasmo (2009:62) menyatakan anggaran sektor publik berisi rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dalam bentuk yang paling sederhana, anggaran publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas. Anggaran berisi estimasi mengenai apa yang dilakukan organisasi di masa yang akan datang. Setiap anggaran memberikan informasi mengenai apa yang hendak dilakukan dalam beberapa periode yang akan datang. Setiap anggaran memberikan informasi mengenai apa yang hendak dilakukan dalam beberapa periode yang akan datang. Anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi utama yaitu: (1) Anggaran sebagai alat perencanaan, (2) Anggaran sebagai alat pengendalian, (3) Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal, (4) Anggaran sebagai alat politik, (5) Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi, (6) Anggaran sebagai alat penilaian kinerja, (7) Anggaran sebagai alat motivasi, (8) Anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik.

Jenis-jenis Anggaran Sektor Publik

Mardiasmo (2009:66) membagi anggaran sektor publik menjadi dua yaitu: (1) Anggaran Operasional yaitu Digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan. Pengeluaran pemerintah yang dapat dikategorikan dalam anggaran operasional adalah belanja rutin. Belanja rutin adalah pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk satu tahun anggaran dan tidak menambah aset atau kekayaan bagi pemerintah. Disebit "rutin" karena sifat pengeluaran tersebut berulang setiap tahun. Pengeluaran yang masuk kategori anggaran operasional antara lain belanja administrasi umum dan belanja operasi dan pemeliharaan, (2) Anggaran Modal/Investasi yaitu Menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot, dan sebagainya. Belanja modal/investasi adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau

kekayaan pemerintah dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaan.

Standar Akuntansi Pemerintah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP dinyatakan dalam bentuk PSAP yang dilengkapi dengan rerangka konseptual pemerintah. Pemerintah menyatakan SAP berbasis akrual, pemerintah juga menyusun sistem akuntansi pemerintah yang mengacu pada SAP. Sistem akuntansi pemerintahan pada pemerintah pusat diatur dalam menteri keuangan yang mengacu pada pedoman umum sistem akuntansi pemerintahan, begitu juga pemerintah daerah dengan peraturan gubernur/bupati/wali kota yang mengacu dengan sistem akuntansi pemerintahan. Adapun tujuan Akuntansi Sektor Publik terkait dengan akuntabilitas sebagai berikut: (1) Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien dan ekonomis atas alokasi suatu sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen, (2) Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggungjawab yang tepat dan efektif program dan penggunaan sumberdaya yang menjadi wewenangnya dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik.

Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Pasal 3 menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah diatur dengan kekuasaan pengelolaan daerah, asas umum, dan APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan Balai Layanan Umum Daerah (BLUD).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi pemerintah daerah selama satu periode pelaporan (Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah dan SKPD). LKPD terutama digunakan untuk membandingkan realisasi anggaran pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi, dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai selama pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, dan keseimbangan antargenerasi.

Keuangan daerah disusun oleh manajemen keuangan daerah. Manajemen keuangan daerah adalah pengorganisasian dan pengelolaan sumber-sumber daya atau kekayaan pada suatu daerah untuk mencapai tujuan yang dikehendaki daerah tersebut. Alat untuk melaksanakan manajemen keuangan daerah disebut dengan tata usaha daerah.

Belanja Pemerintah

Standar Akuntansi Pemerintah menyatakan bahwa belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum negara/daerah. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi yaitu: (1) Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah pusat yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Klasifikasi untuk pemerintah daerah terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, modal,

bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga, (2) Klasifikasi organisasi yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi di lingkungan pemerintah pusat antara lain belanja per kementerian negara/lembaga beserta unit organisasi di bawahnya. Klasifikasi belanja menurut organisasi di pemerintah daerah antara lain belanja Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD), Sekretariat Daerah pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dinas pemerintah tingkat provinsi/kabupaten/kota, lembaga teknis daerah provinsi/kabupaten/kota, (3) Klasifikasi menurut fungsi yaitu klasifikasi yang didasarkan menurut fungsi-fungsi utama pemerintah pusat/daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Contoh klasifikasi belanja menurut fungsi yaitu pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, perlindungan lingkungan hidup, perumahan dan pemukiman, kesehatan, pariwisata dan budaya, agama, pendidikan dan perlindungan sosial.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Sujarweni (2015:60) dalam kutipan Lewadalu (2016:12) menyatakan APBD adalah rencana keuangan yang dibuat pemerintah daerah setiap tahunnya, disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). APBD ditetapkan dengan peraturan daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 17 dijelaskan mengenai ketentuan umum penyusunan APBD: (1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah. Dalam menyusun APBD dimaksud, diupayakan agar belanja operasional tidak melampaui pendapatan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, (2) Penyusunan Rancangan APBD sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) berpedoman kepada rencana kerja pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara, (3) Dalam hal anggaran diperkirakan deficit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut dalam peraturan daerah tentang APBD, (4) Dalam hal anggaran diperkirakan surplus, ditetapkan penggunaan surplus tersebut dalam peraturan daerah tentang APBD.

Laporan Realisasi Anggaran

Oman Rusmana *et al.* (2017:87) menyatakan bahwa Laporan Realisasi Anggaran adalah membandingkan anggaran dengan realisasinya. Selisih antara anggaran dengan realisasinya selanjutnya akan dicatat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa laporan realisasi anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas, dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan: (1) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi, (2) Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi: (1) Telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat, (2) Telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD), dan, (3) Telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Efektivitas

Nordiawan dan Hertianti (2010:161) menyatakan efektivitas menunjukkan kesuksesan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan sebuah kegiatan atau kebijakan dimana ukuran efektivitas merupakan refleksi *output*. Efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan. Berikut adalah faktor penentuan efektif dan efisien (Rondonuwu, 2011): (1) Faktor sumber daya, baik sumber daya manusia seperti tenaga kerja, kemampuan kerja, maupun sumber daya fisik seperti peralatan kerja, tempat bekerja serta dana, (2) Faktor struktur organisasi yaitu susunan yang stabil dari jabatan-jabatan baik struktur maupun fungsional, (3) Faktor teknologi pelaksanaan pekerjaan, (4) Faktor dukungan kepala aparaturnya dan pelaksanaannya baik pimpinan maupun masyarakat.

Efisiensi

Nordiawan dan Hertianti (2010:161) menjelaskan bahwa efisiensi adalah hubungan antara barang dan jasa (*output*) yang dihasilkan sebuah kegiatan/aktivitas dengan sumber daya (*input*) yang digunakan. Suatu organisasi, program, atau kegiatan dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan *output* tertentu dengan *input* serendah-rendahnya, atau dengan *input* tertentu mampu menghasilkan *output* sebesar-besarnya (*spending well*). Efisien dapat ditingkatkan dengan empat cara sebagai berikut: (1) Menaikan *output* untuk *input* yang sama, (2) Menaikan *output* lebih besar dari pada proporsi peningkatan *input*, (3) Menurunkan *input* untuk *output* yang sama, (4) Menurunkan *input* lebih besar dari pada proporsi penurunan *output*.

METODA PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang mencoba untuk memberikan gambaran secara sistematis mengenai masalah, fenomena, pemrograman, ataupun penyedia informasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Penelitian yang menggunakan data yang berbentuk kata-kata atau yang berwujud verbal, bukan dalam bentuk angka. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Penelitian yang menggunakan data yang berbentuk kata-kata atau yang berwujud verbal, bukan dalam bentuk angka. Adapun keseluruhan objek yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Populasi yang diamati ini yaitu berupa data Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas Sosial Kota Surabaya selama tiga tahun yaitu tahun 2016-2018.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode data dokumentasi dan studi lapangan yaitu wawancara. Metode dokumentasi ini sebagai suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan sedangkan wawancara merupakan cara pengumpulan data/informasi dengan melakukan tanya jawab dengan pihak yang mempunyai kaitan cukup erat dengan masalah yang diteliti.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Jenis data sekunder ini adalah mengumpulkan data dari instansi yang terkait, menghitung data yang terkait dengan penelitian selain itu juga dengan cara mencatatnya, sedangkan data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan/suatu organisasi secara langsung atau obyek yang diteliti.

Satuan Kajian Analisis

Efektivitas

Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Efektivitas terkait hubungan pencapaian antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya. Efektivitas dapat menunjukkan kesuksesan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan suatu kegiatan dan kebijakan pemerintah atau perusahaan.

Efisiensi

Efisiensi merupakan ukuran proses yang menghubungkan antara *input* dan *output* dalam operasional perusahaan. Efisiensi berhubungan dengan bagaimana perusahaan atau entitas pemerintah melakukan operasionalnya sehingga dicapai optimalisasi penggunaan sumber daya yang dimiliki dan dengan penggunaan dana yang serendah-rendahnya (*spending well*). Dengan konsep *input-proses-output*, efisiensi adalah rasio antara *output* dan *input*.

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran merupakan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya. Laporan Realisasi Anggaran berhubungan dengan pengeluaran dana daerah untuk kebutuhan Pemerintah Daerah. Laporan Realisasi Anggaran berisi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan transfer dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu dengan cara mengumpulkan data, disusun, diinterpretasikan dan dianalisis sehingga memberikan kesimpulan yang jelas dan obyektif terhadap masalah yang ada dan bertujuan untuk membuat gambaran secara sistematis yaitu mengenai kinerja di Dinas Sosial Kota Surabaya dengan dilihat dari segi efektivitas dan efisiensi Laporan Realisasi Anggaran.

1. Perhitungan Tingkat Efektivitas

Untuk bisa mengetahui dan mengukur tingkat efektivitas pelaksanaan anggaran belanja Dinas Sosial Kota Surabaya, maka digunakan rumus (Mahsun, 2009):

$$Efektivitas = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-237 tahun 1996, tentang kriteria tingkat kinerja keuangan, penetapan tingkat efektivitas anggaran belanja sebagai berikut: (1) Jika hasil perbandingan lebih dari 100% maka anggaran belanja dikatakan sangat efektif, (2) Jika hasil pencapaian antara 90%-100% maka anggaran belanja dikatakan efektif, (3) Jika hasil pencapaian antara 80%-90% maka anggaran belanja dikatakan cukup efektif, (4) Jika hasil pencapaian antara 60%-80% maka anggaran belanja dikatakan kurang efektif, (5) Jika hasil pencapaian dibawah 60% maka anggaran belanja dikatakan tidak efektif.

2. Perhitungan Tingkat Efisiensi

Pada dasarnya efisiensi menunjukkan pengukuran pencapaian output yang maksimum dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya. Maka digunakan rumus sebagai berikut (Mahsun, 2009):

$$Efisiensi = \frac{\text{Realisasi Belanja Langsung}}{\text{Total Realisasi Belanja}} \times 100\%$$

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-237 tahun 1996, tentang kriteria tingkat kinerja keuangan, penetapan tingkat efisiensi anggaran belanja sebagai berikut: (1) Jika hasil perbandingan lebih dari 100% maka anggaran belanja dikatakan tidak efisien, (2) Jika hasil pencapaian antara 90%-100% maka anggaran belanja dikatakan kurang efisien, (3) Jika hasil pencapaian antara 80%-90% maka anggaran belanja dikatakan cukup efisien, (4) Jika hasil pencapaian antara 60%-80% maka anggaran belanja dikatakan efisien, (5) Jika hasil pencapaian dibawah 60% maka anggaran belanja dikatakan sangat efisien.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Efektivitas Anggaran Belanja

Tabel dibawah ini merupakan Data Laporan Realisasi Anggaran Belanja di Dinas Sosial Kota Surabaya.

Tabel 1
Laporan Realisasi Anggaran
Dinas Sosial Kota Surabaya

Tahun	Sub Jumlah Keseluruhan		
	Anggaran	Realisasi	Selisih Anggaran
2016	Rp 203.661.429.251	Rp 192.845.603.295	Rp 10.815.825.956
2017	Rp 245.766.842.499	Rp 228.408.963.083	Rp 16.905.212.909
2018	Rp 253.215.738.160	Rp 231.531.477.724	Rp 21.684.260.436

Sumber: Data LRA Dinas Sosial Surabaya, Diolah

Belanja di Dinas Sosial Kota Surabaya baik yang sudah terealisasi dan yang di anggarkan mengalami penurunan yang berbeda-beda dan memiliki selisih anggaran yang terus meningkat disetiap tahunnya. Pada tahun 2016, target anggaran dengan pencapaian tujuan mengalami penurunan, dimana Selisih Anggaran Tahun 2016 sebesar Rp 10.815.825.956 hal tersebut Selisih Anggaran memang dapat dikatakan lebih kecil dari tahun-tahun setelahnya. Pada tahun 2017, target anggaran dengan realisasi mengalami hal yang sama ditahun sebelumnya yaitu mengalami penurunan, dimana Selisih Anggaran Tahun 2017 sebesar Rp 16.905.212.909 dengan hal ini Selisih Anggaran dikatakan lebih besar dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2018, target anggaran dengan pencapaian tujuan juga mengalami penurunan yang sama dari tahun-tahun sebelumnya, tetapi memiliki selisih nominal yang lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya sebesar Rp 21.684.260.436. Untuk dapat mengetahui Tingkat Efektivitas Laporan Realisasi Anggaran dihitung dengan cara membandingkan Total Realisasi Anggaran Belanja dengan Target Anggaran Belanja.

Efisiensi Anggaran Belanja

Tabel dibawah ini merupakan Data Jumlah Realisasi Anggaran Belanja Langsung dan Jumlah Realisasi Anggaran tiga tahun terakhir Dinas Sosial Kota Surabaya.

Tabel 2
Laporan Realisasi Anggaran Belanja
Dinas Sosial Kota Surabaya

Tahun	Sub Jumlah Keseluruhan	
	Realisasi Belanja Langsung	Total Realisasi Belanja
2016	Rp 183.786.918.929	Rp 192.845.603.295
2017	Rp 217.929.075.665	Rp 228.408.963.083
2018	Rp 221.243.411.714	Rp 231.531.477.724

Sumber: Data LRA Belanja Dinas Sosial Surabaya, Diolah

Dengan menghitung tingkat efisiensi, peneliti dapat membandingkan antara Total Realisasi Belanja Langsung dengan Total Realisasi Belanja secara keseluruhan. Pemerintah

Daerah tidak memiliki ketentuan atau aturan tentang batas persentase minimal penggunaan anggaran maupun realisasi belanja, hanya saja ketentuan tersebut jika penggunaan realisasi anggaran tidak lebih dari target anggaran yang telah ditetapkan. Pada Tahun 2016-2018 perbandingan Realisasi Belanja Langsung hanya selisih sedikit dengan Total Realisasi Belanja. Hal ini terjadi karena Dinas Sosial Surabaya memiliki kebutuhan atau pengeluaran yang banyak untuk memenuhi tugas dan fungsi program dan kegiatan dan tidak ada Pendapatan yang digunakan sebagai pemasukan atau kas.

Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung, dan Pendapatan

Pemerintah daerah menyusun anggaran belanja dibuat guna untuk memenuhi kebutuhan program kerja instansi pemerintah Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung. Selain itu juga pemerintah daerah juga dapat menganggarkan Pendapatan yang digunakan sebagai pemasukan suatu lembaga atau instansi pemerintah. Pemerintah daerah/kota menggunakan Anggaran Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung, dan Pendapatan untuk memenuhi program kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya. Pada Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kota Surabaya, tidak memiliki Pendapatan sehingga kebutuhan program kerja atau penganggaran yang diperlukan hanya kebutuhan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Dengan melihat tabel dibawah ini, peneliti dapat mengetahui perbandingan antara anggaran dengan realisasi belanja langsung dan belanja tidak langsung sebagai berikut.

Tabel 3
Data Olahan Realisasi Anggaran Belanja
Dinas Sosial Kota Surabaya
(dalam Rupiah)

Total Anggaran			
Tahun	Belanja Langsung	Belanja Tidak Langsung	Total Belanja
2016	193.710.915.347	9.950.513.904	203.661.429.251
2017	235.185.920.758	10.580.921.741	245.766.842.499
2018	241.568.394.697	11.647.343.463	253.215.738.160
Total Realisasi			
Tahun	Belanja Langsung	Belanja Tidak Langsung	Total Belanja
2016	183.786.918.929	9.058.684.366	192.845.603.295
2017	217.929.075.665	10.479.887.418	228.408.963.083
2018	221.243.411.714	10.288.066.010	231.531.477.724

Sumber: Data LRA Belanja dan Pendapatan Dinas Sosial Surabaya, Diolah

Dari tabel diatas, perbandingan Anggaran dengan Realisasi tahun 2016, 2017, dan 2018 pada Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung mempunyai perbedaan total anggaran dan total realisasi. Dengan hal ini Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kota Surabaya menggunakan Realisasi Belanja tidak lebih dari Anggaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Surabaya guna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan melihat tabel sebelumnya yaitu total anggaran dan realisasi belanja, peneliti dapat mengetahui selisih anggaran dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung sebagai berikut.

Tabel dibawah ini merupakan Data Laporan Realisasi Anggaran Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung, dan Pendapatan.

Tabel 4
Data Olahan Belanja Langsung
Dinas Sosial Kota Surabaya
(dalam Rupiah)

Belanja Langsung			
Tahun	Anggaran	Realisasi	Selisih Anggaran
2016	193.710.915.347	183.786.918.929	9.923.996.418
2017	235.185.920.758	217.929.075.665	17.256.845.093
2018	241.568.394.697	221.243.411.714	20.324.982.983

Sumber: Data LRA Belanja Langsung Dinas Sosial Surabaya, Diolah

Dari data olahan Belanja Langsung Dinas Sosial Kota Surabaya tahun 2016, 2017, dan 2018 memiliki selisih anggaran dari realisasinya. Dapat diartikan bahwa penggunaan realisasi anggaran tidak melebihi target anggaran yang telah ditetapkan. Kegiatan program kerja Instansi Pemerintah salah satunya Dinas Sosial Surabaya memiliki banyak kebutuhan yaitu pengeluaran sebagai pelaksanaan program kerja. Pengeluaran program kerja yang dilaksanakan berupa Belanja langsung dari Dinas Sosial Kota Surabaya.

Tabel 5
Data Olahan Belanja Tidak Langsung
Dinas Sosial Kota Surabaya
(dalam Rupiah)

Belanja Tidak Langsung			
Tahun	Anggaran	Realisasi	Selisih Anggaran
2016	9.950.513.904	9.058.684.366	891.829.538
2017	10.580.921.741	10.479.887.418	101.034.323
2018	11.647.343.463	10.288.066.010	1.359.277.453

Sumber: Data LRA Belanja Tidak Langsung Dinas Sosial Surabaya, Diolah

Dilihat dari data olahan Belanja Tidak Langsung Dinas Sosial Kota Surabaya tahun 2016, 2017, dan 2018 juga memiliki selisih anggaran. Anggaran yang telah ditetapkan pada belanja tidak langsung dari tahun 2016 hingga 2018 memang terbilang sedikit dibandingkan belanja langsung. Hal ini disebabkan karena pengeluaran biaya untuk program kerja tidak seimbang dengan kebutuhan pribadi atau kepegawaian. Di Dinas Sosial Kota Surabaya, belanja tidak langsung digunakan untuk tunjangan-tunjangan para pegawai dan staff Dinas Sosial Surabaya. Realisasi Belanja Langsung dengan Realisasi Belanja Tidak Langsung memiliki selisih nominal yang besar dari tahun ke tahun.

Dinas Sosial Surabaya tidak memiliki Pendapatan karena Dinas Sosial Surabaya merupakan pusat biaya Pemerintah Kota Surabaya. Apabila dilihat dari empat pusat pertanggungjawaban yang ada salah satunya adalah pusat biaya, Dinas Sosial merupakan pusat biaya pemerintah dimana pusat biaya dalam pemasukan diukur dalam bentuk jumlah uang sedangkan pengeluaran tidak diukur dengan cara yang sama, artinya Dinas Sosial Surabaya memiliki pengeluaran yang lebih besar dari pemasukan. Pusat biaya merupakan pusat pertanggungjawaban yang prestasi suatu organisasi dinilai berdasarkan biaya yang telah dikeluarkan. Pusat biaya Dinas Sosial Surabaya termasuk jenis biaya teknis yaitu biaya yang jumlahnya berhubungan erat dengan volume kegiatan. Volume kegiatan yang dimaksud adalah banyaknya program dan kegiatan Dinas Sosial Surabaya sehingga banyak pengeluaran anggaran belanja daerah Dinas Sosial Surabaya dari pada Pendapatan.

Melihat tabel-tabel diatas, Belanja Langsung memiliki Realisasi Anggaran yang besar dibandingkan Belanja Tidak Langsung sedangkan Pendapatan tidak ada sehingga peneliti dapat menyimpulkan bahwa kebutuhan Belanja Langsung Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kota Surabaya lebih banyak dan membutuhkan anggaran yang lebih besar dari Belanja Tidak Langsung. Belanja Langsung digunakan untuk penyelesaian program kerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Surabaya yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat di Surabaya. Anggaran Belanja seluruhnya akan diberikan di beberapa cabang atau tempat Lingkungan Sosial Dinas Sosial Surabaya sesuai dengan kebutuhan.

Pembahasan

Analisis Tingkat Efektivitas Anggaran Belanja

Berikut tabel tingkat efektivitas anggaran belanja tahun 2016-2018 Dinas Sosial Kota Surabaya.

Tabel 6
Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja
Dinas Sosial Kota Surabaya Tahun 2016-2018
 (dalam Rupiah)

Tahun	Sub Jumlah Keseluruhan		Tingkat Efektivitas (%)	Kriteria
	Anggaran	Realisasi		
2016	203.661.429.251	192.845.603.295	94,68%	Efektif
2017	245.766.842.499	228.408.963.083	92,93%	Efektif
2018	253.215.738.160	231.531.477.724	91,43%	Efektif

Sumber: Data LRA Dinas Sosial Surabaya, Diolah

Dari tabel diatas dapat dilihat selama periode anggaran tahun 2016-2018, Tingkat Efektivitas Anggaran Belanja dikatakan tetap dari tahun ketahun yaitu efektif. Pada tahun 2016 tingkat efektivitasnya yaitu 94,68% dikatakan efektif dan memiliki tingkat efektivitas paling tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun setelahnya. Pada tahun 2017 tingkat efektivitas sebesar 92,93% dikatakan efektif meskipun terjadi penurunan tetapi tidak merubah kriteria tingkat efektivitasnya. Pada tahun 2018 tingkat efektivitas sebesar 91,43% tingkat efektivitasnya mengalami penurunan sedikit dari tahun sebelumnya tetapi masih dalam kriteria efektif.

Jadi dari hasil secara keseluruhan yaitu studi kasus wawancara dengan pihak yang terkait dengan Data Tingkat Efektivitas Anggaran Belanja Dinas Sosial Kota Surabaya tahun 2016-2018 terdapat kesesuaian data, yaitu Tingkat Efektivitas Anggaran Belanja dalam kriteria yang efektif dan kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Surabaya yang dapat menjalankan tugas Realisasi Anggaran dengan memenuhi target dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Surabaya.

Analisis Tingkat Efisiensi Anggaran Belanja

Berikut tabel tingkat efisiensi anggaran belanja tahun 2016-2018 Dinas Sosial Kota Surabaya.

Tabel 7
Tingkat Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja
Dinas Sosial Kota Surabaya Tahun 2016-2018

Tahun	Sub Jumlah Keseluruhan		Tingkat Efisiensi (%)	Kriteria
	Realisasi Belanja Langsung	Total Realisasi Belanja		
2016	183.786.918.929	192.845.603.295	95,30%	Kurang Efisien
2017	217.929.075.665	228.408.963.083	95,41%	Kurang Efisien
2018	221.243.411.714	231.531.477.724	95,55%	Kurang Efisien

Sumber: Data LRA Belanja Dinas Sosial Surabaya, Diolah

Tabel diatas menunjukkan Tingkat Efisiensi dari Realisasi Anggaran Belanja yang ada di Dinas Sosial Kota Surabaya yang terbilang naik dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 tingkat efisiensi yang didapat sebesar 95,30%, pada tahun 2017 tingkat efisiensi yang didapat sedikit mengalami kenaikan sebesar 95,41%, dan di tahun 2018 tingkat efisiensi juga mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 95,55%. Dari penjelasan diatas, Tingkat Efisiensi Realisasi Anggaran Belanja seluruhnya dari tahun 2016-2018 dalam kriteria kurang efisien disebabkan karena Realisasi Belanja Langsung Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kota Surabaya selisih sedikit dari Total Realisasi Belanja di Dinas Sosial Kota Surabaya dikarenakan kebutuhan Belanja Langsung Dinas Sosial Kota Surabaya atau pengeluaran (*output*) yang dihasilkan lebih banyak. Pada kenyataannya, tingkat kriteria efisiensi Realisasi Anggaran Belanja Dinas Sosial Surabaya setiap tahunnya memang dalam kriteria kurang efisien, dikarenakan Dinas Sosial Surabaya yang tidak memiliki Pendapatan dan menjadi pusat pembiayaan Pemerintah Daerah Kota Surabaya dimana pengeluaran anggaran lebih diutamakan dari pemasukan.

Instansi Pemerintah Dinas Sosial Surabaya yang tidak memiliki Pendapatan (*input*) yang dihasilkan pada Realisasi Anggaran Dinas Sosial dalam kategori Anggaran Defisit. Anggaran Defisit dimana anggaran yang digunakan belanja atau kebutuhan lebih banyak dibandingkan dengan Pendapatan, Anggaran Defisit biasa terjadi dan biasanya terjadi pada Instansi Pemerintah Daerah salah satunya Dinas Sosial Kota Surabaya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat Kota Surabaya.

Analisis Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung dan Pendapatan

Pada analisis diatas, peneliti dapat menjelaskan Anggaran Belanja dan Pendapatan yang ada di dalam Laporan Realisasi Anggaran sebagai berikut: (1) Anggaran Belanja yaitu dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 disebutkan bahwa belanja adalah kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan atau aset bersih daerah. Belanja dibagi dua macam yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung, (a) Belanja Langsung yaitu Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Belanja langsung adalah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program-program kerja atau kegiatan pemerintah daerah yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang diberikan sesuai dengan misi SKPD. Contoh belanja langsung seperti belanja pegawai, belanja modal, belanja barang dan jasa, dll.

Pada Dinas Sosial Kota Surabaya, belanja langsung yang dianggarkan seluruhnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan program dan kegiatan Dinas Sosial Surabaya. Contoh dari belanja langsung Dinas Sosial Surabaya yaitu perbaikan rumah tidak layak huni untuk masyarakat miskin, penyelenggara kegiatan sosial, peningkatan kualitas pelayanan di beberapa tempat lingkungan sosial, penyediaan barang dan jasa perkantoran Pemerintah Daerah, dan lain-lain. Susunan program dan kegiatan belanja langsung seluruhnya dalam kategori bantuan sosial. Bantuan sosial merupakan salahsatu contoh dari belanja tidak langsung, meski demikian bantuan sosial tersebut merupakan susunan program dan kegiatan Instansi Pemerintah Dinas Sosial Surabaya yang harus dijalankan. Jadi bantuan sosial tersebut merupakan program dan kegiatan belanja langsung Dinas Sosial Surabaya yang harus dijalankan, (b) Belanja Tidak Langsung yaitu menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Belanja tidak langsung adalah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan tidak memiliki hubungan apapun secara langsung dengan program dan kegiatan suatu instansi pemerintah. Contoh belanja tidak langsung umumnya seperti belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tak terduga.

Pada belanja tidak langsung yang dianggarkan berupa tunjangan-tunjangan para pegawai dan staff Dinas Sosial Surabaya. Tunjangan-tunjangan para pegawai dan staff rutin diberikan setiap tahun oleh Pemerintah Daerah Kota Surabaya. Dalam hal ini, belanja tidak langsung Dinas Sosial Surabaya secara umum dalam kategori belanja pegawai karena untuk memenuhi kebutuhan pegawai. Dilihat dari keterangan sebelumnya belanja langsung dan belanja tidak langsung, kebutuhan belanja langsung yang berisi bantuan sosial untuk memenuhi program dan kegiatan Dinas Sosial Surabaya lebih banyak dan lebih membutuhkan anggaran yang lebih besar dari belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung di Dinas Sosial Surabaya merupakan belanja pegawai berupa tunjangan-tunjangan para pegawai dan staff Dinas Sosial Surabaya. Contoh dari belanja tidak langsung Dinas Sosial Surabaya yaitu gaji pokok PNS, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan kecelakaan kerja, tunjangan kematian, BPJS, dan lain-lain, (2) Pendapatan yaitu dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 1, pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Contoh pendapatan daerah secara umum yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berupa pembagian laba dari BUMD, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah seperti jasa giro, pendapatan bunga, dll.

Pada keterangan pendapatan diatas Dinas Sosial Kota Surabaya tidak memiliki pendapatan karena dilihat dari penjelasan sebelumnya Dinas Sosial Kota Surabaya merupakan pusat pembiayaan Pemerintah Daerah Kota Surabaya, dimana pusat biaya dinilai dari banyaknya pengeluaran daripada penerimaan. Dinas Sosial Surabaya tidak memiliki pendapatan setiap tahunnya sehingga terjadi defisit anggaran dan Dinas Sosial Surabaya dalam susunan anggaran hanya bertugas sebagai pelaksana tugas dan fungsi program kegiatan seperti penjelasan sebelumnya.

SIMPULAN DAN SARAN

simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka disimpulkan bahwa: (1) Pengelolaan anggaran belanja di Dinas Sosial Kota Surabaya memiliki kriteria efektivitas yang sama dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. Pada tahun 2016 tingkat efektivitas dari anggaran belanja Dinas Sosial Kota Surabaya sebesar 94,68% yang berada dalam kategori efektif. Berbeda dengan tingkat efektivitas anggaran belanja pada tahun 2017 sebesar 92,93% dan tahun 2018 sebesar 91,43% yang mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, namun hal ini tidak merubah tingkat efektivitas yang masih dalam kategori efektif, (2) Tingkat atau kriteria efisiensi realisasi anggaran belanja Dinas Sosial Kota Surabaya pada tahun 2016-2018 secara keseluruhan dalam kategori kurang efisien dan mengalami kenaikan setiap tahunnya, dimana pada tahun 2016 sebesar 95,30% dan di tahun 2017 tingkat efisiensi sebesar 95,41% dan juga di tahun 2018 tingkat efisiensi sebesar 95,55%. Jadi anggaran belanja pada Dinas Sosial Kota Surabaya keseluruhan memiliki tingkat efisiensi yang kurang efisien, tidak hanya pada tahun 2016-2018 tetapi juga setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan kebutuhan anggaran belanja Dinas Sosial Surabaya yang banyak dari pada Pendapatan karena Dinas Sosial Surabaya merupakan pusat biaya Pemerintah Daerah dimana pengeluaran atau kebutuhan lebih diutamakan dari pada pemasukan, (3) Hasil Wawancara yang bersumber dari Sub Bagian Keuangan tentang pengelolaan anggaran menyatakan bahwa anggaran yang telah ditetapkan merupakan tugas dari Walikota Surabaya melalui Sekretaris Daerah. Anggaran yang dibuat diberikan kepada Instansi Pemerintah Dinas Sosial Surabaya untuk menjalankan tugas yang telah ditetapkan. Anggaran yang telah terealisasi akan dikembalikan kepada Bagian Keuangan Pemerintah Daerah. Jadi Instansi Pemerintah Dinas Sosial Surabaya hanya menjalankan tugas dan fungsi dari masing-masing bagian yang telah ditetapkan, (4) Pengelolaan anggaran belanja meliputi Anggaran Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung, dan Pendapatan memiliki perbedaan

yang besar. Dimana Belanja Langsung memiliki kebutuhan yang lebih besar untuk memenuhi program dan kegiatan Dinas Sosial Surabaya. Kebutuhan belanja langsung terdiri dari bantuan sosial yaitu perbaikan rumah tidak layak huni untuk warga miskin, peningkatan kualitas pelayanan di beberapa lingkungan sosial, dan lain-lain. Sedangkan untuk kebutuhan Belanja Tidak Langsung terdiri dari belanja pegawai yaitu berupa tunjangan-tunjangan untuk para pegawai dan staff seperti gaji pokok PNS, tunjangan kematian, tunjangan kesehatan, dan lain-lain. Maka dapat disimpulkan bahwa kebutuhan Belanja Langsung Dinas Sosial Kota Surabaya lebih banyak dari Belanja Tidak Langsung dan di Dinas Sosial Surabaya tidak memiliki Pendapatan karena Dinas Sosial Surabaya merupakan pusat pembiayaan Pemerintah Daerah Kota Surabaya sehingga Dinas Sosial Surabaya dapat dikatakan mengalami Anggaran Defisit. Anggaran Belanja Langsung digunakan untuk memenuhi tugas dan fungsi program dan kegiatan Dinas Sosial Surabaya dan kebutuhan rutin masyarakat Surabaya seperti kebutuhan pangan di Lingkungan Sosial di beberapa tempat.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang dapat dikembangkan dalam penelitian yang akan datang. Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu penelitian ini hanya mengambil data laporan realisasi anggaran Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kota Surabaya ppada bagian sekretariat saja, sedangkan pada Dinas Sosial Kota Surabaya memiliki banyak Sub Bagian Organisasi lain yang dapat dijadikan sebagai objek untuk penelitian serupa.

Saran

Pada penelitian selanjutnya, hendaknya bisa menindaklanjuti penelitian ini tidak hanya sebatas pada analisis realisasi anggaran tingkat fektivitas dan efisiensi di Dinas Sosial Surabaya tetapi juga dikaitkan dengan tindak lanjut penelitian berupa studi lapangan lainnya terhadap program kerja dan kegiatan Dinas Sosial Surabaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-237 Tahun 1996. *Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan*. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. *Standar Akuntansi Pemerintah*. Jakarta.
- Rai, I. G. N. 2010. *Audit Kinerja Pada Sektor Publik*. Salemba Empat. Jakarta.
- Klychova, G. S. 2014. *Budgeting Efficiency for Cost Control Purposein Management Accounting System*. Kazan State Universty Rusia.
- Matthew., J. R. 2011. *Assesing Organizastional Effectiveness: The Role Of Performance Measures*. Library Quarterly vol. 81 No. 1. The University of Cikago.
- Jusup, A. H. 2011. *Dasar- dasar Akuntansi*. Edisi Ketujuh. Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN. Yogyakarta.
- Lubis, A. 2010. *Akuntansi Keperilakuan*. Edisi Kedua. Salemba Empat. Jakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. ANDI. Yogyakarta.
- Sujarweni., V. W. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta. Pustaka Baru Press.
- Lewadalu, G. 2016. *Evaluasi Penatausahaan, Penyusunan, dan Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat*. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univeersitas Sam Ratulangi.
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003. *Keuangan Negara*. Jakarta.
- Rusmana, O., D. Setyaningrum., Yuliansyah., Maryani. 2017. *Akuntansi Pemerintah Daerah*. Edisi Pertama. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.

- Nordiawan., D., dan Hertanti. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Kedua. Salemba Empat. Jakarta.
- Rondonuwu, R. 2011. Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis USRAT.
- Mahsun, M. 2009. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFE. Yogyakarta.